SALINAN

LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 (*Corona Virus Desiase 19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
24. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Urutan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
43. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
44. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
45. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
46. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Berisifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
47. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
48. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
49. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

50. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
51. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 31);
52. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
53. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
54. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
55. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
56. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
57. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Cash Management System* Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
58. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);

59. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 11);
60. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
61. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 3);
62. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 8);
63. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan, dan Pemberhentian Staf Honorer Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 6);
64. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Trengginas Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 3);
65. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 4);
66. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 6);
67. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 7);
68. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 8);

69. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 9);
70. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO
dan
LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan Kalurahan	Rp.	6.478.958.526,00
(2) Belanja Kalurahan	Rp.	6.895.793.206,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(416.834.680,00)
(3) Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	521.834.680,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	105.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	416.834.680,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
(4) Kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara terulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 30 Desember 2022
LURAH TRIMULYO,

Ttd.
JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 30 Desember 2022
CARIK TRIMULYO,

Ttd.
ARIF MUHAMMAD FAUZI

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Trimulyo
Kepala Urusan Pangripto

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KALURAHAN TRIMULYO
KAPANEWON JETIS

ANANG SULISTYO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 11
Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul (11/Trimulyo/2022)

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TRIMULYC
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TRIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	690.906.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.736.804.526,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	51.248.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**6.478.958.526,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	1.812.002.900,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.996.586.406,00	
5.3.	Belanja Modal	689.678.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	397.525.900,00	
	JUMLAH BELANJA	**6.895.793.206,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(416.834.680,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	521.834.680,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	521.834.680,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	105.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**416.834.680,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

TRIMULYO, 30 December 2022

LURAH TRIMULYO

Drs. H. JAUZAN SANUSI, MA.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TRIMULYC
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TRIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	690.906.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.736.804.526,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	51.248.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**6.478.958.526,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**2.936.534.456,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**2.334.260.456,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	691.552.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	691.552.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.252.500,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.252.500,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	316.387.556,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	316.387.556,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	132.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	132.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	26.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	149.870.000,00	DDS, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.870.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	1.225.800,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.225.800,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal	15.360.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	15.360.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	97.634.000,00	PAD, PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	97.634.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	383.906.600,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	383.906.600,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	48.960.000,00	PBH
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	48.960.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	190.512.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	190.512.000,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer	174.300.000,00	ADD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	174.300.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**138.258.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	55.800.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	77.458.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	77.233.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**75.326.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17.080.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.080.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.100.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	53.416.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.416.000,00	
1.3.94		Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	2.730.000,00	DDS
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**273.053.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	33.524.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.524.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	59.862.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.862.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	47.365.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.365.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	21.088.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.088.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.825.000,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	26.968.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.968.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	3.771.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.771.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.850.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	34.075.000,00	DDS
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.075.000,00	
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	39.725.000,00	DDS
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.725.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**115.637.000,00**	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	51.841.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.841.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	2.831.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.831.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	60.965.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.965.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**2.630.288.600,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**51.925.500,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	11.862.500,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.862.500,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	31.093.000,00	BMP
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.093.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	8.070.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.070.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	900.000,00	DLL
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**704.680.100,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	185.740.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.740.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	99.950.500,00	BMP, DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.950.500,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	25.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	274.165.000,00	BMP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	274.165.000,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	11.690.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.690.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	3.789.600,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.789.600,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	32.325.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.325.000,00	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	61.000.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)	10.520.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.520.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**1.003.206.000,00**	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	24.220.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	23.970.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	768.391.000,00	PBK, SDD
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	633.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	135.391.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	130.595.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	130.595.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	80.000.000,00	PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**557.421.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	332.560.000,00	BMP, DDS, PBK,
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.560.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	224.861.000,00	BMP, DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	224.861.000,00	
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**63.025.500,00**	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	23.350.500,00	BMP
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.350.500,00	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	39.675.000,00	DDS
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.675.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**106.300.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.800.000,00	DLL
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	104.500.000,00	DDS, PBK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.500.000,00	
2.8.		**Sub Bidang Pariwisata**	**143.730.500,00**	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	30.650.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	108.905.500,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.500,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	105.875.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.175.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**524.201.500,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**83.058.500,00**	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	24.475.000,00	DDS, DLL
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.475.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	9.850.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	14.496.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.496.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11.150.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Benca na (FPRB)	2.830.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	20.257.500,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.257.500,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**173.000.000,00**	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18.775.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.775.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	13.350.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	84.600.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.600.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	56.275.000,00	DDS, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.275.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**187.426.500,00**	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	19.850.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.850.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.685.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.685.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	24.950.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	95.865.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.840.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	77.025.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	43.076.500,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.076.500,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**80.716.500,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.084.500,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.084.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	59.352.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.352.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.280.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.280.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**407.242.750,00**	
4.1.		**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**	**13.315.000,00**	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.105.000,00	DDS, SDD
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.105.000,00	
4.1.90		Bimtek/Pelatihan/Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan	3.210.000,00	SDD
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**336.821.750,00**	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	17.080.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.080.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	83.839.000,00	SDD
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	83.839.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) d an Peternakan	229.727.750,00	DDS, SDD
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.727.750,00	
4.2.91		Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen	6.175.000,00	DDS, SDD
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.175.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**8.195.000,00**	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	4.315.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.315.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.880.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**12.061.000,00**	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	12.061.000,00	BMP, DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.061.000,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**36.850.000,00**	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	36.850.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.850.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**397.525.900,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**3.125.900,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	3.125.900,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.125.900,00	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**2.000.000,00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**392.400.000,00**	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	392.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	392.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**6.895.793.206,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(416.834.680,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	521.834.680,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**416.834.680,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

TRIMULYO, 30 December 2022

LURAH TRIMULYO

Drs. H. JAUZAN SANUSI, MA.